

Terorisme dan Indonesia

BARU-BARU ini Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan bahwa pendekatan lunak menjadi cara untuk meredam munculnya sel-sel kelompok teroris di setiap negara. Indonesia sendiri telah mengalami ber-puluh kali serangan teroris. Bukan hanya jiwa manusia yang menjadi korban, tetapi dampaknya sangat luas dan lama penyembuhannya.

Sesungguhnya semua gerakan terorisme itu merupakan kejahatan internasional dan dapat dilakukan oleh setiap orang atau kelompok, kapan, di mana dan terhadap siapa saja. Indonesia juga sudah beberapa kali mengalami betapa dahsyatnya gangguan dari terorisme itu. Tanda-tanda masih adanya terorisme di negeri ini masih sering dijumpainya.

Usaha Bersama

Mengingat ancaman terorisme di negeri ini tetap potensial, maka usaha bersama itu mutlak perlu. Meski sampai saat ini belum ada kata sepakat yang bisa diterima secara universal apa yang dimaksud dengan terorisme itu. Selama ini terorisme muncul sebagai senjata dalam suatu perjuangan politik umumnya dijalankan pihak yang lemah. Artinya, pihak yang tidak mampu untuk mencapai tujuan politiknya dengan cara-cara perjuangan yang dianggap biasa. Maka sering dikatakan bahwa terorisme adalah gejala kelemahan politik, gejala ketidakdewasaan politik dan gejala frustrasi politik. Semuanya melahirkan fanatisme dan fanatisme melahirkan terorisme.

Berdasarkan pola pikir tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa terorisme adalah paham seseorang atau kelompok yang mencoba atau melaksanakan kehendaknya melalui suatu paksaan atau intimidasi. Paksaan atau intimidasi tersebut dengan menciptakan situasi atau kondisi rasa ketakutan seseorang atau kelompok masyarakat sehingga seseorang atau kelompok masyarakat tersebut merasa kehilangan kepercayaan atau kehilangan perlindungan.

Bila dicermati dari serangkaian peristiwa

A Kardiyat Wiharyanto

yang pernah terjadi, terorisme hakikatnya merupakan intensifikasi rekayasa kekuatan fisik, sehingga dengan sedikit bekal bisa diperoleh keuntungan besar. Maka terorisme menjadi alat paling efektif dan ampuh untuk memperjuangkan kepentingan politik.

Bertolak dari latar belakang kemungkinan terjadinya terorisme tersebut, timbulnya terorisme bisa dilihat dari dua sisi. Di samping memunculkan suatu keprihatinan, terorisme juga sebagai alat introspeksi diri yang efektif. Ini berarti kita jangan hanya melihat peristiwa yang menyedihkan itu dari satu sisi, tetapi mungkin juga dilatarbelakangi suatu sistem yang memunculkan terorisme tersebut. Sistem kekuasaan dan kehidupan suatu negara memang bisa berefek positif tetapi juga negatif terhadap negara lain.

Lebih Sulit

Mengapa RI jadi sasaran teroris? Sejak 1998 RI menganut sistem demokrasi yang sebenarnya. Kondisi RI yang demokratis memudahkan teroris mengarahkan ancaman kepada warga sipil untuk mendesakkan kepentingannya. Dalam sistem demokrasi itu pula peranan militer lebih pada pertahanan. Sehingga teroris itu hanya menghadapi pihak keamanan (polisi) yang dianggapnya lebih 'lunak'.

Setelah menjalani sistem demokrasi sekitar 2 tahun, 1 Agustus 2000 serangan bom teroris pertama di kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta. Sampai saat ini, sudah 20-an kali serangan di Indonesia. Serangan yang paling banyak terjadi pada malam Natal 24 Desember 2000, yakni 11 kali. Sedangkan yang paling hebat 12 Oktober 2002 di Bali yang menewaskan 202 orang.

Sebagai negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, RI lebih sulit menghadapi teroris diban-

ding dengan negara-negara demokrasi maju. Sebab, di samping menghadapi gerakan terorisme masih harus menghadapi kesulitan ekonomi. Dan celakanya pula beban ekonomi itu justru disebabkan imperialisme ekonomi yang dilancarkan negara-negara maju.

Karena kondisi setiap negara berbeda-beda, pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan pula seperti pendekatan politis, hukum, dan sosial. Andaikata terorisme itu yang berlatarbelakang politis, maka penyelesaiannya juga dengan tindakan politis pula. Misalnya, penghentian timbulnya kekerasan politik dan menjembatani dialog guna menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan politik. Jika cara ini tidak dilakukan, bisa saja kelompok yang tidak terakomodasikan kepentingannya menyalurkannya dengan tindakan yang bersifat teror.

Mudah-mudahan pemerintah lebih sigap lagi dalam mencegah dan menindak gerakan terorisme itu. Hal itu bisa dicapai bila pemerintah terus melakukan introspeksi secara cermat dari semua kebijakan. Sebab hanya dengan itu rasa aman masyarakat negeri ini tetap terselenggara. □ - c

Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.